

Tinjauan Mata Kuliah

Bagi negara seperti Indonesia, penerimaan dari sektor pajak merupakan unsur penting untuk mengisi kas negara. Walaupun demikian, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Untuk kepentingan tersebut, telah dibuat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pemungutan pajak, seperti: Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM), serta Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP). Pada hakekatnya UU KUP merupakan ketentuan formal untuk memungkinkan pemungutan pajak dapat terlaksana dengan benar dan tepat.

Mata Kuliah Tatacara Pelaksanaan Perpajakan pada dasarnya membahas tentang apa dan mengapa negara memungut pajak, bagaimana pemungutan itu dilaksanakan, serta bagaimana cara dan peran pemerintah dalam mengawasi pemungutan itu. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa mata kuliah ini merupakan pedoman utama untuk memahami konteks perpajakan dari UU KUP terkait dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemungutan pajak. Melalui mata kuliah ini, Anda akan memperoleh keterampilan tentang tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan pemungutan pajak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka pembahasan Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan terbagi dalam sembilan modul yang saling menunjang dan berkesinambungan secara sistematis.

Modul pertama, membahas pengertian hukum secara umum, pembagian hukum materiil dan hukum formal, hukum pajak di Indonesia.

Modul kedua, membahas tentang makna pajak, perbedaan pajak dan berbagai metoda penetapan dalam pemungutan pajak

Modul ketiga, membahas tentang peran negara dalam pemungutan pajak, dan organisasi yang berwenang dalam pemungutan pajak serta subyek pajak dan wajib pajak,.

Modul keempat, membahas kewajiban pokok setiap wajib pajak dalam mendaftarkan dan mengisi Surat Pemberitahuan yang merupakan media penting dalam melaksanakan *system self assessment*.

Modul kelima, membahas bagaimana dan kapan pembayaran pajak harus dilakukan, serta kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan.

Modul keenam, membahas tentang peran dan fungsi pemerintah dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak berupa pemeriksaan pajak atau verifikasi, penerbitan ketetapan pajak dan sanksi- sanksi yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak.

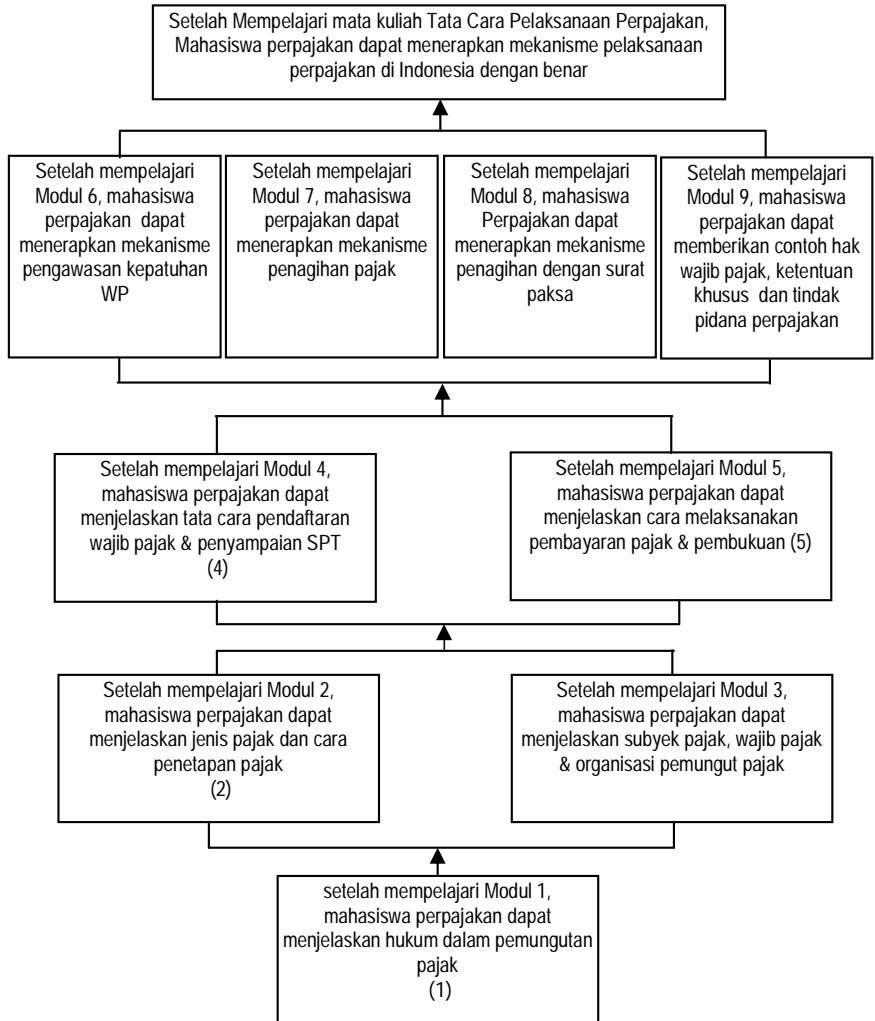
Modul ketujuh, membahas tindak lanjut dari tindakan pengawasan, berupa penerbitan ketetapan pajak dan implementasi atas sanksi terkait dengan penerbitan ketetapan pajak.

Modul kedelapan, membahas proses penagihan pajak melalui penagihan dengan surat paksa, dan hak- hak wajib pajak bila terjadi sengketa pajak dalam sistem perpajakan Indonesia.

Modul kesembilan, membahas tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak, ketentuan khusus seperti siapa yang berhak mewakili wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, kerahasiaan jabatan mereka yang dapat ditunjuk menjadi kuasa wajib pajak dalam penyelesaian sengketa perpajakan, dan pidana di bidang perpajakan.

Rangkaian isi pembahasan Mata kuliah Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan dapat dilihat pada peta kompetensi berikut ini.

Peta Kompetensi Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan/PAJA3339/3 SKS



Agar Anda berhasil menguasai materi-materi tersebut di atas, ikutilah petunjuk belajar berikut!

1. Baca pendahuluan setiap modul dengan cermat sebelum membaca materi kegiatan belajar!
2. Baca materi kegiatan belajar dengan cermat!
3. Kerjakan latihan sesuai petunjuk/rambu-rambu yang diberikan. Jika tersedia kunci latihan, janganlah melihat kunci sebelum mengerjakan latihan.
4. Baca rangkuman, kemudian kerjakan tes formatif secara jujur tanpa terlebih dahulu melihat kunci.
5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh dalam mempelajari setiap kegiatan belajar.

Jika petunjuk di atas Anda ikuti dengan disiplin, Anda akan berhasil.

Selamat Belajar!